

BAB I

PENDAHULUAN

A. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Perempuan di Kerala secara historis telah menikmati tingkat melek huruf, pelayanan kesehatan & pelayanan bersalin yang lebih baik, juga posisi sosial atau partisipasi publik berada pada level yang sama antara perempuan dan laki-laki. Salah satu wadah yang mewujudkan keberhasilan kaum perempuan di Kerala yaitu Kudumbashree.

Kudumbashree merupakan sebuah ruang sosial bagi perempuan di Kerala untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan serta aspirasi komunitas mereka. Melalui jaringan tersebut, perempuan di Kerala mendapatkan kesempatan besar untuk mengembangkan kemampuan mereka yang terkait dengan pengembangan potensi, administrasi, organisasi dan lainnya.

Meningkatnya angka melek huruf di kalangan perempuan, sekaligus mendudukkan Kerala menjadi negara bagian dengan tingkat peserta didik perempuan tertinggi di India. Lebih dari 49 persen peserta didik adalah kaum hawa.¹ Kunci dari

¹ "Perempuan Kerala" dalam: http://en.wikipedia.org/wiki/perempuan_kerala, diakses tanggal 28 Maret 2011

keberhasilan Kerala adalah penetrasi kebijakan yang sensitif dan memberi manfaat langsung terhadap perempuan. Pada tahun 2001-2002 terdapat 30 skema proyek yang bertujuan memberikan manfaat langsung untuk perempuan Kerala.

Kerala juga menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar 10 persen untuk proyek yang bermanfaat bagi kaum Hawa tersebut. Kerala memiliki beberapa lembaga besar yang mendukung program pemberdayaan perempuan, misalnya Kerja Sama Pembangunan Perempuan Negara Bagian Kerala (*Kerala State Women Development Corporation*), Komisi Perempuan Negara Bagian Kerala, serta Kudumbasree.

Hasil yang telah dicapai oleh perempuan Kerala dalam usaha meningkatkan kesetaraan terhadap gender di Kerala India dibuktikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum hawa melalui Kudumbasree maupun organisasi perempuan lainnya yang lebih besar seperti *All India Democratic Women's Association* (AIDWA). Keberhasilan tersebut membuat penulis tertarik untuk mengangkat tema "**Faktor-faktor yang Mendorong Terwujudnya Kesetaraan Gender di Kerala India**" sebagai judul skripsi.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

India merupakan salah satu Negara di Kawasan Asia Selatan yang masih kental akan unsur-unsur kebudayaannya, seperti dalam sistem sosialnya yaitu kasta. Dalam sistem tersebut (kasta), tergambar adanya tingkatan dan batasan-batasan di dalam kehidupan sosial dan politik. Dengan kondisi seperti itu, kaum perempuan sangatlah sulit untuk berpartisipasi baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik. Hal tersebut menjadi sebab terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan di India, yang berdampak pada pembangunan dan kesejahteraannya.

Di Kerala sistem kasta tersebut telah dihapuskan melalui kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kiri yang menguasai politik dan pemerintahan Kerala. Kebijakan penghapusan kasta tersebut dengan tujuan untuk kesejahteraan sosial yang merata, sehingga perempuan di Kerala dapat menikmati semua fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Kondisi sosial dan ekonomi perempuan di Kerala jauh lebih baik jika dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di Negara bagian lainnya di India.

Tingkat pembangunan manusia, pembangunan gender dan pemberdayaan gender merupakan konsekuensi dari prestasi di bidang kesehatan dan pendidikan bagi perempuan. Data yang

diberikan dalam tabel 1 dan 2 berikut ini jelas menunjukkan status perempuan di Kerala yang lebih baik dalam hal pendidikan dan kesehatan dibandingkan dengan rekan-rekan mereka di negara bagian lainnya di India.

Dalam Tabel 1, data dari empat indikator pendidikan yaitu melek huruf perempuan, kesenjangan gender dalam tingkat melek huruf, pendaftaran dan putus sekolah di tingkat sekolah dasar untuk negara bagian di India. Seperti dapat dilihat dari data, Kerala memiliki melek huruf perempuan tertinggi, terendah kesenjangan gender dalam melek dan terendah putus sekolah di tingkat sekolah dasar untuk anak perempuan.

Tabel 1.1

Indikator Pendidikan Perempuan				
Negara Bagian	Perempuan Melek 2001	Kesenjangan Gender 2001	Pendaftaran Sekolah Dasar 1999-2000	Putus Sekolah Dasar 1999-2000
Bihar	33.57	56.75 (4)	61.46	58.64
UP	42.98	27.25 (3)	50.18	62.16
Rajasthan	44.34	32.12 (1)	83.81	62.68
MP	50.28	56.52 (5)	102.4	22.97
Orrissa	50.97	24.98 (7)	91.48	44.38
AP	51.17	19.68 (13)	101.39	41.23
Assam	56.03	15.90 (21)	105.36	42.20
Haryana	56.31	22.94 (10)	82.98	12.78
Karnataka	57.45	18.84 (14)	105.87	27.19
Gujarat	58.60	21.90 (11)	101.43	28.10
Benggal Barat	60.22	17.36 (19)	94.86	58.48
Punjab	63.55	12.08 (24)	81.71	20.15
Tamil Nadu	64.55	17.78 (18)	98.62	39.19
Maharashtra	67.51	18.76 (15)	112.32	21.72
Kerala	87.86	6.34 (26)	84.74	-5.00
Semua India	54.16	21.69	85.18	42.28
Catatan: Angka dalam kurung adalah peringkat berdasarkan intensitas kesenjangan gender				

Sumber: Data pada kolom 2 & 3 diperoleh dari Sensus India, 2001; dan data pada kolom 4 & 5 diperoleh dari Departemen Pengembangan SDM untuk Statistik Tingkat Pendidikan Terpilih Pemerintah India, 2001

Tingkat melek huruf dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan guru sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, kesenjangan gender dalam melek adalah hasil dari sikap umum masyarakat terhadap pendidikan anak perempuan tersebut. Tingkat partisipasi Kerala untuk anak perempuan di sekolah dasar memang bukan yang tertinggi, namun penurunan tingkat keluar (putus sekolah) merupakan yang terendah, sehingga menyiratkan tingkat retensi yang sangat tinggi untuk anak perempuan di tingkat sekolah dasar.

Banyak negara-negara seperti Rajasthan, UP, Bihar dan Bengal Barat, memiliki penerimaan yang rendah dan tingkat putus sekolah yang tinggi menyiratkan tingkat retensi sangat rendah. Ini adalah tanda berbahaya karena, di negara-negara seperti itu, sangat sedikit anak perempuan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini memiliki efek kumulatif dalam mendorong perempuan untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor informal yang dibayar dengan tidak memerlukan pendidikan khusus atau keterampilan. Dampak lanjutan dari pendidikan yang rendah adalah pada kesehatan mereka melalui kurangnya kesadaran tentang berbagai program kesehatan bagi perempuan. Status perempuan Kerala baik pendidikan mungkin dapat menjadi pelopor status kesehatan yang lebih baik bagi mereka.

Secara kultural, Kerala juga merupakan satu-satunya negara bagian di India, dimana kerukunan beragama terjalin secara alamiah dengan tingkat toleransi yang tinggi. Sesuatu yang bagi India secara keseluruhannya masih membutuhkan perjuangan yang panjang, berdarah, dan melelahkan. Dalam sebuah negara di mana masyarakatnya terbagi-bagi dalam sistem kasta, Kerala juga merupakan satu-satunya negara bagian di mana kasta terendah bisa memperoleh akses yang sama terhadap fasilitas publik yang disediakan pemerintah. Pendidikan di Kerala juga sedari awal didesain melintasi garis gender dan kasta, dua masalah yang begitu rumit dalam konfigurasi masyarakat India.²

Indikator yang dipilih untuk mencerminkan status kesehatan perempuan adalah usia rata-rata saat menikah, tingkat fertilitas total, persentase wanita dengan anemia, angka kematian ibu dan angka kematian bayi perempuan. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2. Kerala memiliki usia rata-rata tertinggi pada pernikahan untuk perempuan. Di banyak negara usia rata-rata pada perkawinan kurang dari usia minimum yang ditetapkan yaitu 18 tahun.

²“Pendidikan, Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan di Kerala” dalam:
<http://www.isical.ac.in/~wemp/Papers/PaperLakshmyDevi.doc>, diakses tanggal 13 April 2011

Tabel 1.2

Indikator Kesehatan Wanita

Indikator Kesehatan Wanita					
Negara Bagian	Usia rata-rata Pada Pernikahan	Jumlah Kesuburan	Persentase wanita dengan anemia	Kematian Ibu	Kematian Bayi untuk anak perempuan
Bihar	16.95	3.31	63.4	452	62.3
UP	17.27	3.99	48.7	707	83.5
Rajasthan	16.67	3.78	48.5	670	83.9
MP	16.62	3.31	54.3	498	89.5
Orrissa	17.96	2.46	63.0	367	96.0
AP	16.81	2.25	49.8	159	63.5
Assam	18.23	2.31	69.7	409	76.4
Haryana	17.88	2.88	47.0	103	78.4
Karnataka	18.00	2.13	42.4	195	56.7
Gujarat	19.01	2.72	46.3	28	64.8
Benggala Barat	17.21	2.29	62.7	266	43.0
Punjab	19.70	2.21	41.4	199	56.4
Tamil Nadu	19.12	2.19	56.5	79	54.5
Maharashtra	17.91	2.52	48.5	135	48.5
Kerala	19.85	1.96	22.7	198	15.3
Semua India	17.68	2.85	51.8	407	70.8

Sumber: Data pada kolom 2 diperoleh dari Sensus India, 2001; dan data pada kolom 3 & 4 diperoleh dari Survei Nasional Kesehatan Keluarga, 2000; sedangkan data pada kolom 5 & 6 diperoleh dari hasil Pendaftaran Contoh Buletin, 2000.

Kerala juga memiliki tingkat kesuburan terendah dan persentase terendah wanita dengan anemia. Angka kematian ibu di Kerala juga jauh lebih rendah daripada rata-rata India pada umumnya. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa angka kematian ibu yang tinggi adalah hasil dari kondisi umum yang buruk pada kesehatan daripada risiko yang melibatkan kelahiran anak. Kematian bayi perempuan Kerala secara signifikan lebih rendah dari semua negara-negara bagian lainnya di India. Semua ini jelas menunjukkan status kesehatan perempuan Kerala yang lebih baik.

Pada tingkat nasional, perempuan buta huruf masih berkisar di angka 45,8 persen yang artinya separuh penduduk perempuan India. Namun di Kerala, perempuan tidak melek huruf ada sekitar 12,4 persen. Lihat tabel 1.3 yang menunjukkan Tingkat Melek Huruf pada tiap Kabupaten yang berbeda di Kerala.

Tabel 1.3

Tingkat Melek Huruf perKabupaten di Kerala India

Keaksaraan (%)		
Kabupaten	Laki-laki	Perempuan
Kasaragod	90.84	79.8
Kannur	96.38	89.57
Wayanad	90.28	80.80
Kozhikode	96.30	88.86
Malappuram	91.46	85.96
Palakkad	89.73	79.31
Thrissur	95.47	89.94
Ernakulam	95.95	90.96
Idukki	92.11	85.04
Kottayam Kottayam	97.41	94.45
Alappuzha	96.42	91.14
Pathanamthitta	96.62	93.71
Kollam	94.63	88.60
Thiruvananthapuram	92.68	86.26
Kerala	94.20	87.86

Sumber: Sensus India, 2001

Pendekatan lain yang digunakan untuk menganalisis pengaruh gender pada model pengembangan Kerala menggunakan pengukuran jarak pembangunan antara setiap negara bagian dengan bantuan indikator pembangunan yang berbeda pula. Dalam analisis tersebut, terdapat 11 indikator yang menjadi tolak ukur pembangunan perempuan di 16 negara bagian di India. Indikator tersebut diambil dan diidentifikasi dari Laporan Nasional Pembangunan Manusia.³

³ “Perempuan Menantang Globalisasi: Perempuan dalam Ekonomi Global: Isu Kebijakan dan Advokasi” dalam: <http://www.wedo.org/ffd/ffd2.htm>, diakses tanggal 19 April 2011

Tabel 1.4

Indikator Pembangunan Manusia

Indikator	X1	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8	X9	X10	X11
AP	978	63	51	7.4	54.2	49.8	51.7	46.7	4.17	20.92	0.801
AS	932	56.6	87	9.9	24	69.1	56.03	42.9	4.3	42.99	0.575
BI	921	58.2	89	10.2	26.3	63.4	33.57	26.1	3.66	7.07	0.469
GJ	921	62.5	82	7.5	44.6	46.3	55.61	57.1	4.69	45.54	0.714
HA	861	64.3	54	8	27.4	47	56.31	56.2	4.78	24.15	0.714
HP	970	61.4	81	7	63.4	40.5	57.08	70.7	5.12	41.02	0.858
KN	964	64.5	72	7	45.4	42.4	57.45	57.2	4.34	25.95	0.573
KR	1058	75.8	41	4.9	35.3	22.7	87.86	91.1	5.48	74.31	0.825
MP	920	54.7	136	10.9	50.7	54.3	50.55	40.9	4.42	18.11	0.662
MH	922	66.2	76	6.7	48.3	48.5	67.51	65.1	4.64	41.59	0.793
OR	972	56.6	111	10.7	40.6	63	50.97	48	4.09	20.74	0.639
PU	874	68.6	53	6.8	33.9	41.4	63.55	63.2	4.96	31.03	0.71
RJ	922	59.6	79	8.7	50.2	48.5	44.34	26.3	3.83	8.31	0.692
TN	986	61.8	51	7.2	47.6	56.5	64.55	74.8	5.2	34.89	0.813
UP	898	56.4	104	10.6	29.1	48.7	42.97	28.8	4.33	10.69	0.52
WB	934	63.1	51	7.3	22.2	62.7	60.22	42.4	4.03	28.87	0.631
INDIA	933	61.4	79	8.6	38.5	51.8	54.03	45.4	4.46	23.76	0.676

Keterangan: (AP-Andhra Pradesh, AS-Assam, BI-Bihar, GJ-Gujarat, HA-Haryana, HP- Himachal Pradesh, KN-Karnataka, KR-Kerala, MP-Madhya Pradesh, MH-Maharashtra, OR-Orissa, PU-Punjab, RJ-Rajasthan, TN-Tamil Nadu, UP-Uttar Pradesh, WB-West Bengal, India)

(Sumber: Sensus India 2001)

- Catatan: X1: Rasio jenis kelamin 2001
- X2: Harapan Hidup perempuan 1992-96
- X3: Tingkat Kematian Bayi perempuan 1991
- X4: Angka Kematian perempuan 1997
- X5: Peringkat Keikutsertaan Angkatan Kerja perempuan 1999-00
- X6: Persentase Perempuan dengan anemia 1998-99
- X7: Peringkat melek huruf perempuan 2001
- X8: Pendaftaran perempuan di sekolah usia (6 - 11) 1991
- X9: Intensitas dari pendidikan Perempuan 1993
- X10: Tingkat melek huruf Perempuan perkasta 2001
- X11: Index Kesetaraan Gender 1991

Data di atas dengan jelas menunjukkan bahwa perempuan di Kerala jauh lebih baik daripada rekan mereka di tempat lain di India dengan mempertimbangkan semua variabel yang didefinisikan di atas. Partisipasi aktif dari perempuan Kerala tidak seperti di beberapa Negara bagian lainnya, banyak perempuan Kerala secara resmi tergolong miskin dan sangat aktif dalam *Kudumbashree* (program Pemerintah Kerala dalam

memberantas kemiskinan). *Kudumbashree*, bagi kaum perempuan di sini disebut juga sebagai CDS (*Community Development Social*).

C. PERUMUSAN MASALAH

Dari berbagai uraian yang telah di kemukakan oleh penulis di atas, maka penulis mengambil sebuah pokok permasalahan sebagai berikut : **"faktor-faktor apa yang mendorong keberhasilan program kesetaraan gender di Kerala India?"**

D. KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan perspektif kesetaraan gender. Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan perhitungan secara sistematis dan tidak bersifat universal. Gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan perempuan dari sudut non biologis. Gender biasanya digunakan untuk menunjukan

pembagian peran dan kerja yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan.⁴

Untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender, muncul suatu konsep mengenai kesetaraan gender dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. Keadilan gender berarti persamaan visi, kekuasaan dan partisipasi antara kedua jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) dalam semua bidang kehidupan baik pribadi maupun publik.

Masalah kesetaraan dan keadilan gender tidak dapat dipisahkan dari proses perjuangan hak-hak asasi manusia PBB tahun 1948. Pada tahap awal hak-hak asasi manusia hanya menekankan pada pentingnya perlindungan terhadap hak-hak individu setiap warga Negara dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Titik perhatian pertama lebih kepada hak-hak politik, yang selanjutnya berkembang menjadi hak sosial, ekonomi dan budaya seseorang. Pelaksanaan hak-hak asasi inilah yang memberikan aspirasi bagi perempuan untuk memperjuangkan hak-hak reproduksinya sebagai aktualisasi diri

⁴ Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, *Buku III: Pengantar Teknik Analisa Gender, Kantor Meneg Urusan Peranan Wanita*, Jakarta, 1992 hal 3.

dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan pembangunan.

Dalam menganalisa permasalahan kesetaraan gender yang terjadi di suatu negara, diperlukan teori yang relevan. Adapun dalam menganalisa kasus kesetaraan gender yang terjadi di Kerala India, penulis mengacu pada konsep *gendermainstreaming/* pengarusutamaan gender (PUG). *Gendermainstreaming/* pengarusutamaan gender (PUG) merupakan perwujudan dari komitmen global penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesamaan, kesempatan dan perlakuan bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan peran-peran politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam masyarakat. Secara substansial munculnya konsep *gendermainstreaming/* pengarusutamaan gender (PUG) diilhami oleh 3 prinsip pokok. *Pertama*, menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya. Prinsip ini berasal dari paradigma *politics of difference* yang melihat perempuan dan laki-laki sebagai orang yang memiliki tanggung jawab masing-masing. Sebagai manusia, perempuan dan laki-laki harus mendapatkan penghargaan dan penghormatan yang sama. Prinsip ini menolak memperlakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan peran-peran sosial mereka sebagai suami atau isteri dan yang tidak mempedulikan bahwa perempuan dan

laki-laki memiliki kebutuhan masing-masing yang bisa jadi berbeda. *Kedua*, yaitu demokrasi yang berarti menempatkan anggota masyarakat sipil dalam proses-proses pemerintahan. Demokrasi juga bermakna adanya partisipasi masyarakat sipil dalam merancang dan membangun kebijakan yang akan mempengaruhi hidup mereka. Dalam aspek demokrasi ini PUG menekankan arti penting keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan pembangunan. *Ketiga*, adalah *Fairness* (pemerataan), *justice* (keadilan dan penegakan hukum) dan *equity* (kesetaraan). Prinsip ketiga ini lebih lazim dikenal dengan sebutan keadilan sosial.

Upaya untuk mengimplementasikan PUG memerlukan 7 unsur pokok, yaitu dukungan politik, kebijakan, sumberdaya, sistem data dan informasi, kelembagan, alat analisis gender dan dukungan masyarakat sipil. Efektivitas pelaksanaan strategi PUG sangat ditentukan oleh penguatan tujuh prasyarat di atas disertai dengan keberanian untuk memasukkan dimensi gender dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan.⁵ Semua itu tidak terlepas dari: (1) dukungan politik dengan melakukan advokasi kepada para pengambil kebijakan di tingkat eksekutif,

⁵ “Three principle of gender mainstreaming” dalam: <http://capacitydevelopment.net/documents/ElementsGM.pdf>, diakses tanggal 27 Juni 2011

yudikatif dan legislatif tentang arti PUG, (2) penilaian kembali semua produk kebijakan sehingga tidak ada lagi kebijakan yang bertolak belakang dengan prinsip kesetaraan gender, (3) sumberdaya yang akan menjadi pelaksana program PUG, (4) sistem data dan informasi yang memadai untuk menggambarkan status dan kondisi perempuan, (5) kelembagaan, yaitu merevitalisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan sehingga memiliki keyakinan diri ketika berhadapan dengan sektor-sektor lain, (6) alat analisis yang dapat menggenderkan format-format perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan, dan (7) dukungan masyarakat sipil untuk memperkuat dukungan politik dan kebijakan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender yang terjadi di Kerala India dipengaruhi oleh aspek struktural yaitu; pemerintah Kerala sebagai pengambil kebijakan dalam meningkatkan kesetaraan gender, dengan didukung oleh sumberdaya yang tersedia, serta sistem data dan informasi yang menunjukkan adanya kesetaraan gender, dan memiliki kelembagaan seperti *Kudumashree* sebagai lembaga pemberdayaan perempuan yang membantu kaum perempuan di Kerala India.

Jika dilihat secara struktural Kerala merupakan negara bagian yang sukses karena secara politik dikuasai oleh Partai

Komunis India-Marxist (*CPI-M/the Communist Party of India Marxist*). Peran partai kiri tersebut telah membuat perubahan dan kemajuan bagi Kerala baik dibidang pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam menggunakan fasilitas publik yang telah disediakan oleh Pemerintah. Disamping itu tingkat melek huruf perempuan dan pendidikan, usia perkawinan, dan juga tingkat partisipasi kerja perempuan yang lebih besar telah menunjukkan bahwa perempuan Kerala telah berhasil mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki-laki.⁶

E. HIPOTESA

Berdasarkan pada kerangka landasan teori yang ada, maka dapat ditarik suatu hipotesa, bahwa kesetaraan gender yang terjadi di Kerala India dapat terwujud karena adanya **faktor struktural** yaitu adanya peran Pemerintah sehingga perempuan memiliki kekuatan sosial-politik dan ekonomi.

⁶ “The-Hindu-Bisnis-Line” dalam: <http://www.thehindubusinessline.in/2003/03/10/stories/2003031001321300.htm>, diakses tanggal 09 Mei 2011

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memaparkan data-data yang tersedia apa adanya dan penelitian analisis adalah penganalisisan kualitatif secara sistematis untuk mengetahui hubungan antar data yang dipaparkan.

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan teknik *Library Research* dengan mengumpulkan data sekunder. Data-data tersebut diambil dari beberapa buku, dokumen-dokumen resmi, dan jurnal-jurnal, serta dilengkapi dengan berbagai informasi yang diperoleh dari internet, dan surat kabar.

G. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun penelitian yang dilakukan bertujuan untuk:

- Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesetaraan gender di Kerala India.
- Mengetahui sejauh mana peran Pemerintah dalam meningkatkan kesetaraan gender di Kerala India.

Manfaat penelitiannya antara lain:

- Manfaat teoritis, merupakan sumbangan bagi akademis terkait materi gender di Kerala India

H. BATASAN PENELITIAN

Untuk mengawali pembahasan terhadap permasalahan yang ada, maka penelitian ini dilakukan mulai dari tahun 1957 di mana pada tahun tersebut merupakan kemenangan dari Partai kiri yang berpengaruh besar bagi Negara bagian Kerala. Penelitian ini kemudian dibatasi pada tahun 2001, karena pada tahun tersebut Kerala terus menunjukkan prestasi demi prestasi baik di bidang social, politik dan ekonominya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan apabila penulis menjelaskan di luar batasan tersebut untuk memperkuat dan dapat dijadikan data pendukung penulisan, dalam catatan diperhatikan relevansinya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

1. Bab I, membahas pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika penulisan.
2. Bab II, membahas mengenai profil Negara bagian Kerala dan gambaran mengenai kesetaraan gender di Kerala India.
3. Bab III, membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Kerala di bidang sosial-politik.
4. Bab IV, membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah Kerala di bidang ekonomi.
5. Bab V, merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan sebagai penutup dari tulisan ini.